

DIPLOMASI INDONESIA PADA MASA REFORMASI 1998-2023

Ayu Sabrina

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat,
Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, JAMBI
Email: ayusabrina2204@gmail.com

Abstract: *Changes in the Indonesian political and government system from 1945 to 2023. In the 1945-1959 period, Indonesia faced political and economic instability, with neglected development and prosperity. In 1965, the military took power, centralized the government system, and focused on economic development and prosperity. Before the Reformation, Indonesia, under the leadership of Presidents Sukarno and Suharto, was active in international politics. The Reform Era brought significant changes in Indonesia's foreign policy, which was influenced by every president in office, such as B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), and Joko Widodo (Jokowi). This study uses qualitative methods to show how each president influenced the direction of Indonesia's foreign policy.*

Keywords: *Reform, Diplomacy, Politics, Foreign Policy.*

Abstrak: Perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga 2023. Pada periode 1945-1959, Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi, dengan pembangunan dan kemakmuran yang terabaikan. Pada tahun 1965, militer mengambil alih kekuasaan, memusatkan sistem pemerintahan, dan fokus pada pembangunan ekonomi serta kesejahteraan. Sebelum Reformasi, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno dan Soeharto, aktif dalam politik internasional. Era Reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang dipengaruhi oleh setiap presiden yang menjabat, seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi). Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menunjukkan bagaimana setiap presiden memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi, Diplomasi, Politik, Kebijakan Luar Negeri.

PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-20, dunia mengalami perubahan signifikan dalam konteks politik dan ekonomi global.

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, tidak hanya menandai transisi dari pemerintahan Orde Baru ke sistem demokrasi, tetapi

juga mengubah dinamika politik luar negeri Indonesia. Globalisasi yang pesat, serta munculnya kekuatan baru dan perubahan aliansi internasional, menuntut Indonesia untuk menyesuaikan strategi diplomatiknya agar tetap relevan dalam sistem internasional yang baru.

Reformasi membawa perubahan mendalam dalam struktur politik Indonesia, termasuk desentralisasi kekuasaan, peningkatan partisipasi publik, dan reformasi institusi. Perubahan ini mempengaruhi arah dan cara pelaksanaan diplomasi luar negeri. Pergantian presiden dan perubahan kebijakan domestik berdampak pada prioritas dan pendekatan diplomatik Indonesia. Sebagai contoh, kebijakan luar negeri di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo masing-masing mencerminkan kepentingan dan perspektif yang berbeda terhadap isu-isu global dan regional. Pada masa kemerdekaan, Indonesia sudah terlibat dalam di tengah proses politik *International* pada masa periode Presiden Sukarno. Pada Konferensi Asia-Afrika 1955, Gerakan Non-Blok akhirnya lahir. Ia aktif dalam politik internasional dan berpotensi menjadi pionir dalam pembentukan

ASEAN dan negara-negara lain. Tapi arah ini telah memindahkan mereka ke negara-negara timur. Indonesia merupakan negara yang berperan aktif dalam bidang politik internasional. Politik luar negeri bebas aktif RI saat itu masih ditempuh dengan pendekatan politik luar negeri universal. Pada tingkat praktis, hubungan dan kolaborasi, hal baiknya adalah bahwa setiap negara berjalan dalam semangat satu juta teman, nol musuh. Pendekatan ini difokuskan Indonesia membangun jembatan untuk berbagai kepentingan dan posisi di panggung internasional sebagai wujud kontribusi Indonesia terhadap ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di tingkat internasional, Indonesia Menurut Mohammad Hatta (1998), "seperti mendayung di antara dua batu", perjalanan ini penuh bahaya, satu terlalu dekat dengan salah satu karang. Indonesia dapat mengatasi perubahan dalam kepemimpinan dan identitas politik Indonesia jika berubah. Ketika kepemimpinan Presiden Suharto pada saat itu mengubah kebijakan, dia awalnya dekat dengan blok timur, tetapi beralih ke blok barat. Hal ini terlihat dalam upaya Indonesia untuk menuntut bantuan asing dari negara-negara Barat (Batabyal, 2016). Namun, identitas politik luar negeri Indonesia

adalah "bebas dan aktif". Masih dipertahankan, tetapi aplikasinya telah berubah. Identitas ini dapat berubah selama proses politik suatu negara. Seperti di era sebelum reformasi, setiap presiden akan membawa gaya dan politik luar negerinya sendiri. Pergantian presiden telah terjadi beberapa kali, mengikuti proses dan pemilu Indonesia yang dinamis. Ringkasnya, perubahan politik Indonesia berujung pada berakhirnya era orde baru. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh gaya dan arah terhadap identitas politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi dipengaruhi oleh tokoh politik nasional. Dengan latar belakang permasalahan di atas, artikel ini membahas politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi (1999-2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari studi kuantitatif dengan pendekatan sejarah, menggunakan metode sejarah sesuai dengan yang diuraikan oleh Nugroho Notosusanto. Metode ini terdiri dari empat tahap: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (penilaian sumber), analisis interpretasi, dan catatan sejarah (penyajian hasil). Langkah pertama adalah heuristik, yaitu proses

pengumpulan data historis baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber sejarah berisi bukti-bukti dari studi pustaka, yang dikumpulkan untuk mendukung pemecahan masalah penelitian.

Tahap awal mencakup pengumpulan bahan utama yang relevan dengan topik penelitian, termasuk sumber sekunder. Louis Gottschalk mengidentifikasi sumber sekunder sebagai testimoni non-saksi yang berisi materi asli yang telah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku terkait topik yang diteliti.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang melibatkan penyaringan sumber sejarah melalui dua fase. Pertama, kritik eksternal, yaitu pemrosesan atau pemilihan data fisik dari sumber sejarah yang ada. Semua karakteristik bahan sejarah harus diverifikasi untuk memastikan relevansi terhadap subjek. Kedua, kritik internal, yaitu pemilihan inti dari data historis setelah melewati kritik eksternal, untuk memastikan kesesuaian bahan sejarah dengan penelitian.

Langkah ketiga adalah analisis atau interpretasi, yaitu proses menafsirkan data yang telah tervalidasi dan menghubungkan fakta-fakta dalam bentuk konsep yang dihasilkan dari

analisis materi sejarah. Pada tahap ini, penulis menggabungkan sumber-sumber terkait untuk memperdalam tinjauan pustaka, dengan fokus pada topik seperti peran Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia selama era Reformasi.

Tahap keempat adalah penyajian sejarah, yaitu proses menyusun dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis. Sejarawan menyajikan sejarah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian mereka secara sistematis dan kronologis. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan peran Presiden dalam reformasi pemerintahan serta ketentuan yang diterapkan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebijakan Yang Di jalankan Oleh Presiden Republik Indonesia

1. Baharuddin Jusuf Habibie

Keadaan Ekonomi semakin berkelanjutan sesudah masa ORBA disebut Reformasi, hal ini menjadi salah satu penyebab lengsernya Presiden Soeharto. Yang mana pada masa ini diawali masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie perubahan tidak bisa berbuat banyak serta lebih fokus dengan kasus dalam negara. Massa demonstrasi terus mendesak presiden

B.J. Habibie untuk merespon tuntutan reformasi dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan politik, kebebasan berserikat, rekrutmen politik, membebaskan berusaha dan berbagai kebebasan lainnya serta mendirikan partai politik. Pada Tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden atas desakan sebagian masyarakat indonesia dan krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997. Menurut UU 1945. Habibie ditetapkan sebagai Presiden sampai habis masa jabatan Soeharto yakni bulan Mei 2003, pada masa itu wakil presiden masih dijabat oleh B.J. Habibie. Pemerintahan yang hanya 518 hari dianggap kelanjutan Orde Baru sebagai pemerintahan transisi meskipun Presiden Habibie merespon tuntutan tersebut. kebijakan yang ditempuh presiden Habibie yakni memfokuskan pemulihan ekonomi karena krisis finansial yang terjadi. kebijakan ini mengarahkan kepada kemaritiman sehingga membuat permasalahan lain terlihat terabaikan begitu saja, Habibie dan Menlunya juga Ali Alatas dalam Agenda Politik Negeri Indonesia mencetuskan: 1).akan menangani kasus Timor-Timur. 2).Mengusahakan dukungan dari komunitas Negara pendonor dan dana

moneter (IMF), guna pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. 3). Meningkatkan peranan dalam ASEAN (Nazar Nasution, 2016) pada waktu itu B.J. Habibie membuat kebijakan mengenai Tim-Tim tanpa berkonsultasi dengan Menteri-menteri serta DPR melalui surat tertanggal 19 Desember 1998, dengan menyetujui saran PM Australia John Howard. an *Act of Self Determination* atau agar kepada rakyat Tim- tim diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam perkembangan seterusnya pada Mei 2002. Secara resmi PBB mengakui Tim-Tim dengan Hasil referendum yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Tim-tim sebanyak 344. 580 atau 78,5 persen menolak otonomi, dan 94. 388 atau 21.5 persen mendukung otonomi, yang kemudian menjadi negeri yang merdeka dengan nama Timor Leste (Nazar Nasution, 2016: 98- 100). Indonesia dipandang sebagai Negara besar yang mana terdapat istilah “kerabat tua tapi tidak mendekte serta bijaksana”. Dikalangan ASEAN. sehingga dihargai kerana berhasil meyakinkan Negara- Negara Dikawasan Asia Tenggara, terutama meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. dalam bentuk FDI sebanyak mungkin.

2. Presiden Abdurrahman Wahid

Presiden GusDur memperbaiki citra Dalam rangka mengembalikan citra Indonesia pada masa pemerintahannya, menggunakan cara berkunjung ke berbagai Negara dalam 12 bulan. Dengan setiap kali pertemuan dengan kepala Negara Gus Dur membahas isu- isu domestik yakni, antara lain seperti Timor- Timur, kasus Aceh, dan isu perbaikan ekonomi. Hubungan Indonesia dengan Barat dikabarkan sempat menurun sesudah Timor Timur berpisah dari Indonesia, terutama hubungan Indonesia dengan Australia. Pada kebijakannya, Presiden GusDur lebih memfokuskan peningkatan citra Indonesia dimata Internasional.

Kegagalan ORBA telah menjadi penilaian pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur yang bertujuan untuk secara signifikan memperbaiki dan meningkatkan masalah maritim melalui Kerangka Persepsi Domain Maritim (MDA). Dalam politik luar negeri, hal yang paling mencolok pada masa pemerintahan presiden GusDur, secara khusus intensitas diplomasi bilateral lebih sering menjadi tantangan dibandingkan praktik diplomasi multilateral (Haryanto & Isman, 2016: 240). Pada masa Reformasi yang ditempuh oleh Presiden GusDur, diawali dengan langkah awalnya menunjuk

Sarwono Kusuma atmadja sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan Seperti Asip, Sarwono adalah adik dari Mochtar yang membantu mengkonsolidasikan Indonesia diantara bangsa bangsa lain. Pada Tanggal 10 November 1999, tepat setelah dilantik pada tanggal 26 oktober 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Kelautan. Pendahulu dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan dilimpahkannya tugas pengelolaan sumber daya kelautan secara oseanografi, perikanan dan navigasi menjadi salah satu tugas bersama kementerian pada masa ORBA. Di training course disebutkan terakhir maritime.

3. Megawati Soekarno Putri

Dalam masa pemerintahan Presiden Megawati terus disibukkan dengan kasus dan masalah yang ada didalam negeri, dapat dilihat dari masalah tersebut seperti adanya pemberontakan GAM di Aceh dengan solusi operasi militer. Kebijakan luar negeri Indonesia yang ditempuh pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri yakni melalui Pembangunan dan ekonomi stabilitas Kawasan.

Walaupun Presiden Megawati lebih memfokuskan ke kasus perekonomian , namun ada juga kebijakan maritim ditandai dengan keluarnya PPNo. 38 Tahun 2002 tentang Pokok Negara Indonesia, PPNo. 37 tahun 2002 tentang hak dan

kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas laut dan pulau-pulau dengan terusan perdana. ditandai dengan keluarnya PPNo. 38 Tahun 2002 tentang Pokok Negara Indonesia, PPNo. 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas laut dan pulau-pulau dengan terusan perdana., serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penangkapan Ikan. Hal ini ialah kebijakan dari Ketiga regulasi tersebut cukup signifikan terhadap pertumbuhan diplomasi dibidang maritim. Masalah kelautan yang meliputi hak Indonesia atas perairan dengan bersumber Deklarasi Djuanda (BPPK Kemlu, 2015: 52), diatur dalam PP No. 38 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 2004 yang pada awalnya merupakan turunan dari beberapa undang-undang kelautan. Menentukan batas perairan pedalaman di teluk, muara atau kanal, di Kuala Lumpur dan di daerah pelabuhan. Garis penutup dapat ditarik, sesuai dengan pasal 50, sesuai dengan Hukum Maritim 1982.

Dalam hal ini, Pasal 50 tidak mengatur bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penentuan batas-batas perairan pedalaman perairan di dalam garis air rendah

asalkan pantai itu terletak Perairan pedalaman dan perairan pedalaman Nusantara dapat ditarik sepanjang pantai, dan dalam kombinasi dengan garis rendah ini, mereka juga berfungsi sebagai batas-batas perairan pedalaman. Di perairan nusantara. Keputusan ada di undang-undang. di perairan kepulauan. Keputusan tersebut tercantum dalam UU Tahun 1996 tentang daerah laut kepulauan. belum ada ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan lintas alur laut kepulauan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang daerah laut Indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan dengan lintas alur laut kepulauan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. tahun 1996. Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Rute laut kepulauan merupakan lintas yang memiliki kebebasan-kebebasan tertentu dapat menjadi Konvensi yang dapat menimbulkan banyak efek darisegi keamanan, serta lewat rute- rute yang umumnya digunakan buat pelayaran internasional. Penerapan hak lintas air laut kepulauan ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (12). Pemerintah Indonesia sedang mencoba penetapan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat internasional melalui IO yang berwenang pada

bagian navigasi warga, yaitu (PP No. 37, 2002) IMO. Dalam membantu upaya pemulihan ekonomi serta stabilitas keamanan Negara dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi, dimana nasib ratusan ribu ataupun bisa jadi jutaan pengungsi dalam kondisi amat memprihatinkan. Presiden Megawati tengah memfokuskan dan mementingkan berkunjung ke daerah yang sedang berseteru domestik, seperti NAD, Maluku, Papua, Kalimantan.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Pada awal periode pemerintah Presiden SBY merupakan langkah Awal yang baik karena berakhirnya pemberontakan GAM. Terpilihnya Presiden SBY sebagai presiden secara demokratis oleh rakyat, karena dinilai memiliki kondisi ekonomi politik domestik yang stabil. Politik Indonesia semakin meningkat sering dengan beberapa keberhasilan misalnya, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi anggota G20, "*the third largest democracy*". Perubahan perubahan diluar negeri memiliki sifat pragmatis kreatif dan oportunis, dan terdapat kemampuan beradaptasi pada perubahan-perubahan domestik. Yang memiliki arti rasa kepercayaan, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia

internasional, yakni: *unity, harmony, security, leadership, prosperity*. Hal ini membuat hubungan bagi siapa saja yang ingin membantu dan memberi manfaat bagi pihak Indonesia. Faktor ini telah menjadi sebuah ciri khas. Membentuk kemitraan strategis dengan negara lain seperti Jepang, China, India dan lain-lain. Selain daripada itu, dua kemitraan strategis telah berhasil ditanda tangani yaitu Amerika Serikat dan China. Terdapat ciri-ciri Politik Luar Negara yang diterapkan pada periode Presiden SBY, Konsep *millionfriends– zeroenemy* diaplikasikan dalam beberapa hal. Presiden SBY adalah presiden daerah yang membawa kursi berbeda dengan berdiskusi sebuah pemikiran sehingga dikenal dengan *Coral Triangle Initiative* (CTI), hal ini terdapat dalam isu kemaritiman Indonesia. . CTI merupakan daerah mencakup beberapa negara: Pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) ke-8 yang diadakan di Brasil pada tahun 2006, Presiden SBY menyampaikan Tindak lanjut gagasan CTI yang didasari, pada Fakta bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya merupakan habitat dari berbagai jenis karang terbesar (setidaknya ada 5.000 jenis karang). Artinya Indonesia sendiri memiliki flora amat sangat kaya (KemenLu Republik Indonesia, 2015). Persetujuan industri pelayaran dalam

negeri ini kemudian diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Negara juga menawarkan peluang bisnis bagi perusahaan pelayaran dalam negeri untuk memperoleh sebagian dari muatannya, serta cabotage untuk melindungi kedaulatan negara. Dengan 5.500 flagships, pedoman ini telah berhasil menambah atau menggandakan jumlah kapal milik negara yang bobot matinya meningkat hingga tiga kali lipat (Yakti & Joko, 2017: 114). Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden SBY dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Masalah Kelautan 2014. Indonesia merupakan wilayah yang paling dinamis secara ekonomi dan politik di lapangan karena letak geografisnya yang berada di antara dua benua Asia dan Australia serta dua lautan yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain potensi sumber daya alam di wilayah laut dan keunggulan komparatif letak geografisnya. Untuk daerah tepi dan pulau kecil, potensi ini dapat diterima jika dapat digali dari bawah air, lapisan tanah, kolom air, dan bagian laut. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjaga laut Indonesia yang harus dikelola, dilindungi, dimanfaatkan dan dilestarikan. Dalam hal ini harus dijabarkan menjadi kekayaan yang sama

menurut kepentingan yang ada, telah menjadi aturan pada Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

5. Joko Widodo

Jokowi terpilih sebagai presiden Indonesia pada Oktober 2014. Elit politik militer pertamanya, dan elit ekonomi tidak jauh. Sesaat setelah pelantikan presiden ke-7 Indonesia, Jokowi akan dating ke pertemuan APEC, ASEAN, East Asia Summit dan G20. kegiatan politik diplomasi Pertama Jokowi ini membuktikan keberlangsungan besar era SBY. Menariknya, pendekatan presiden Jokowi untuk mengangkat menteri Luar negeri didasarkan pada gelar profesional. walaupun tampak kelanjutan bersama, terdahulunya ada perbedaan tampak dalam diplomasi Presiden Jokowi. Dengan kata lain, merupakan upaya memperkenalkan dan mengembangkan sumber daya kelautan Indonesia berdasarkan konsep PMD (Agustino, 2016:189).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bersama Presiden Jokowi Nawa Sita Bapenas Negara Tengah (RPJMN), kementerian Luar Negeri menyusun Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019 (Renstra). Renstra memiliki visi menjadi Negara maritime untuk kemaslahatan

rakyatnya, dengan motto “Diplomasi Rakyat” dan “Mewujudkan Martabat Diplomatik untuk meningkatkan Identitas Rakyat”. “Renstra Kemlu 2015-2019 mengidentifikasi 3 tugas: sasaran dan tujuan. Tiga tugas dari 8 sasaran kemlu yakni:

- a. Memperkokoh pemimpin tanah air sehingga negara maritime dan *International Days* di wakikan Republik Indonesia telah memenuhi syarat.
- b. Penguatan Kemlu sebagai kekuatan penegak hubungan luar negeri Di sisi lain, tiga tujuan Kemlu yang tertuang dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:
 - i. Kepemimpinan Indonesia di tengah Diplomasi Internasional.
 - ii. Nilai ekonomi sedang optimal.
 - iii. Peningkatan kualitas SDM Kementerian Luar Negeri delapan target strategis Kemlu adalah :
 - 1) Kerja sama maritim dan pinggirannya yang kokoh.
 - 2) Peran kepemimpinan Indonesia ditengah dunia internasional.
 - 3) Kerja sama perekonomian yang kuat.
 - 4) Pelayanan dan perlindungan yang prima

bagi warga negara Indonesia dan pelaku usaha Indonesia (BWI) dan diaspora.

- 5) Diplomasi yang bermutu.
- 6) Sportivitas dan keterkaitan menjadi optimal terhadap kebijakan luar negara Indonesia.
- 7) Mendorong keterampilan institusi melalui keterampilan SDM Kementerian Luar Negeri di bidang teknologi Kemlu dipandang sebagai pionir Menjaga kedaulatan, menjamin keamanan dan dukungan kesejahteraan maritim Indonesia. Inilah sebabnya mengapa diplomasi sangat penting untuk urusan.



Sumber: <https://tirto.id/politik-luar-negeri-jokowi-memperluas-pasar-angkat-citra-islam-dkuZ>

KESIMPULAN

Era reformasi membawa demokratisasi dan keterbukaan politik yang memungkinkan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Indonesia. Indonesia memperluas jangkauan diplomatiknya, tidak hanya terfokus pada negara-negara barat tetapi juga menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang, serta memasukkan isu-isu baru seperti HAM, lingkungan, dan ekonomi ke dalam agenda diplomatik. Indonesia lebih aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional dan regional, memungkinkannya untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu-isu global. Pemerintah Indonesia menjadi lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses diplomasi, serta gencar melakukan upaya untuk meningkatkan citra dan posisi Indonesia

di dunia internasional. Meskipun terdapat kemajuan, diplomasi Indonesia juga menghadapi tantangan baru, seperti koordinasi antarinstansi pemerintah, pengaruh kepentingan domestik, dan adaptasi terhadap perubahan global.

DAFTAR PUSTAKA

Internet (karya individual):

Jefri Sianipar, dkk.
<https://slideplayer.info/slide/3191850/>. Diakses tanggal 07 Agustus 2024 pukul 19.44 WIB.

Internet (artikel dalam jurnal online):

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Batabyal, A.A. (2016). *Accessibility, Vulnerability, and Resilience in a Stochastic Model of Sustainable Ecotourism*. Transportation Research Part D, 43, 71 – 81.
- BPPK Kemlu RI. (2015). *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Haryanto, Agus., dan Isman Pasha. (2016). *Diplomasi Indonesia Realitas dan Prospek, Pendahuluan*. Yogyakarta: Pustaka ilmu.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Diplomasi Indonesia 2014*. (edisi 2). Jakarta.
- Louis Gostchalck. 1983. *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman 32.
- Nasution, A. Z. P., Nazar, M. R., & Aminah, W. (2018). *Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba (Studi*

Kasus Pada Perusahaan yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). E-Proceeding of Management. Vol 5 No(3). Hal 3455–3462.

- Notosusanto Nugroho. (1971) *Norma-Norma dasar penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kelautan Pusat Sejarah ABRI.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
- Yakti, Probo Darono, and Joko Susanto. 2017, “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesiambungan Strategi Global & Strategis 11 (2): 108–25.